

Silahkan buat Bab 1 PENDAHULUAN dengan menampilkan fenomena dan research gap

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tuntutan kebutuhan yang semakin kompleks dan serba percepatan menyebabkan adanya perubahan dan perlunya teknologi dalam lingkungan pemerintah daerah, hal ini dapat dilihat dengan adanya perkembangan peralatan teknologi canggih yang mampu membantu manusia memenuhi kebutuhan hidup secara lebih canggih, salah satunya adalah melalui teknologi informasi. Seiring perkembangan waktu, di era keterbukaan seperti saat ini kebutuhan manusia akan informasi yang tepat, akurat dan handal terus meningkat, menyebabkan para pembuat informasi harus lebih bekerja ekstra, karena informasi sudah harus menyentuh seluruh lini kehidupan mulai dari tingkat individual, kelompok dan tingkat organisasi. Terlepas apakah organisasi tersebut bergerak di bidang politik, ketatanegaraan, bisnis maupun pendidikan. Penggunaan informasi digunakan oleh seluruh kelompok masyarakat yang tujuannya untuk memperlancar proses pengambilan keputusan.

Teknologi informasi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat pada dekade ini yang diikuti dengan pesatnya kemajuan dibidang tersebut. Dengan berkembangnya dan majunya teknologi informasi, memacu organisasi untuk menggunakan teknologi tersebut sebagai pengolah dan penyedia informasi. Saat ini teknologi informasi telah

menjadi faktor yang sangat dominan dalam penerapan sistem informasi sebagai solusi organisasi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Sistem informasi yang diterapkan didalam organisasi adalah komponen yang menjadi bagian dari organisasi bersama dengan individu-individu didalam organisasi untuk saling berintraksi dan saling memanfaatkan untuk mendapatkan hasil kerja yang efektif dan efisien. Sistem Informasi Manajemen merupakan salah satu bentuk sistem informasi yang berfungsi untuk membantu para penggunanya dalam mengambil keputusan. Laudon dan Laudon terjemahan Sungkono (2008:22) mengemukakan definisi sistem informasi manajemen sebagai berikut :

Sistem informasi manajemen merupakan sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan (mendapatkan), memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan didalam organisasi

Pendapat tersebut dapat dipahami bahwa tujuan dari penerapan sistem informasi manajemen ditujukan untuk menyediakan informasi dalam menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam kegiatan suatu organisasi. Keberhasilan sistem informasi pada organisasi bergantung pada bagaimana sistem ini dijalankan dan memberikan kemudahan bagi para pemakainya serta mampu memanfaatkan teknologi yang digunakan tersebut.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik yang diberi kewenangan oleh

pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah diatur oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian disempurnakan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan selanjutnya disempurnakan kembali dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang tersebut memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, menetapkan kebijakan sendiri, melakukan pembiayaan sendiri serta pertanggungjawaban keuangan sendiri. Kewenangan yang luas, utuh dan bulat pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat.

Pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya pada organisasi sektor bisnis, tetapi juga pada sektor publik. Salah satu instansi sektor publik yang memanfaatkan teknologi sistem informasi adalah pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah teknologi sistem informasi telah menjadi kebutuhan untuk menunjang proses pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas bagi pelayanan publik.

Dalam rangka melaksanakan penyusunan anggaran daerah, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memanfaatkan teknologi informasi agar dapat mempermudah proses pengolahan data keuangan. Kewajiban memanfaatkan teknologi informasi oleh pemerintah daerah

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi direalisasikan dalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi yang disebut Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. SIMDA keuangan dirancang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan salah satunya untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja.

Teknologi informasi suatu organisasi digunakan untuk meningkatkan kinerja para individual sebagai anggota organisasi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi. Penggunaan sistem informasi dibidang Penyusunan Anggaran, merupakan proses penggabungan berbagai komponen baik yang mempunyai bentuk fisik (*hardware*), maupun non fisik (*software*) yang saling berhubungan dan berintegrasi secara harmonis yang akan membantu penggunaanya dalam mencatat, mengolah transaksi baik keuangan maupun non keuangan yang selanjutnya menghasilkan informasi yang digunakan oleh manajemen sebagai dasar dalam pengambilan keputusan

Dalam rangka mengemban amanat Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 untuk memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan SIMDA keuangan sebanyak 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan telah menerapkan SIMDA Keuangan salah satunya adalah

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Tujuan dari kebijakan penerapan SIMDA keuangan ini adalah untuk menghasilkan informasi keuangan secara cepat, tepat waktu, lengkap, akurat dan dapat diandalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik pada umumnya dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi pada khususnya.

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mulai menerapkan SIMDA keuangan ini dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2012, dimana sebelumnya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan secara manual dengan menggunakan Excel yang mana dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu yang lebih lama serta tingkat kesalahan dalam penyusunan Anggaran tersebut lebih tinggi.

Pemanfaatan SIMDA keuangan khususnya dalam penyusunan anggaran sangat dibutuhkan, dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktivitas kerja bagi penggunanya. Dimana dengan meningkatnya kinerja para individual sebagai anggota organisasi diharapkan pula dapat meningkatkan kinerja organisasi.

Untuk menunjang kinerja pengguna SIMDA Keuangan, selain perancangan sistem yang harus baik dan sesuai dengan strategi serta budaya organisasi, faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan penggunaan sistem informasi adalah sikap atau perilaku pengguna (*user*)

dari sistem tersebut. Pengguna yang memiliki persepsi bahwa penggunaan SIMDA Keuangan akan memberikan manfaat, menyenangkan dan memudahkan dalam menyelesaikan tugasnya akan lebih mudah menerima dan menggunakan sistem baru secara konsisten, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja individu dibanding sebelum menggunakan sistem. Untuk membangun persepsi manfaat, persepsi menyenangkan dan mudahnya menggunakan suatu sistem informasi akuntansi yang baru diterapkan, tentunya harus didukung oleh desain sistem yang mudah digunakan (*user friendly*), sosialisasi dan pelatihan yang memadai, keterwakilan fitur menu yang ada dalam sistem sesuai dengan tugas *user*, jumlah informasi yang bisa diperoleh dan dukungan fasilitas yang tersedia (kondisi yang memfasilitasi)

Berdasarkan hal tersebut, untuk memperoleh gambaran lebih jauh tentang kebijakan penerapan SIMDA keuangan khususnya tentang pemahaman pegawai, serta kualitas informasi yang dihasilkan dari kebijakan penerapan SIMDA keuangan ini, maka penelitian mengambil judul sebagai berikut “Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dalam Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir”

1.2 Identifikasi Masalah

Tujuan dari kebijakan penerapan SIMDA keuangan pada dasarnya sudah cukup baik, tetapi sering kali dalam pelaksanaannya masih terdapat

kendala yang dihadapi, berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

- a. Masih kurangnya pemahaman pegawai tentang SIMDA keuangan
- b. Masih lemahnya kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

“Bagaimanakah implementasi kebijakan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dalam Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir?”

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud

Adapun maksud peneliti melakukan penelitian ini untuk memperoleh gambaran mengenai Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dalam penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Informasi

Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dalam penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penerapan SIMDA Keuangan dalam penyusunan Anggaran
- b. Sebagai wahana bagi peneliti untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari serta hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya

2. Kegunaan Secara Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, saran dan masukan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir dalam rangka meningkatkan implementasi kebijakan penerapan SIMDA Keuangan.

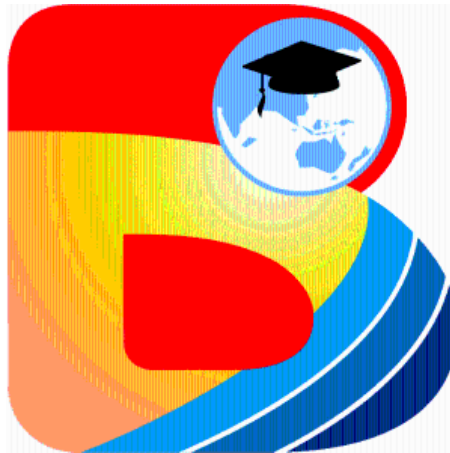
TUGAS 3

Mata Kuliah : Metodologi Riset

Tema

BAB 1 PENDAHULUAN

Dosen : Dr. Muji Gunarto, S.Si, M.Si.



Disusun Oleh :

MOHD. AMRAH RIDHO

(182510080)

Program Studi Manajemen S2

Universitas Bina Darma

Palembang

2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah sebuah bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal pelaksanaan perekonomian negara. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang handal.

Hakekat pembangunan nasional menurut Propenas adalah rencana pembangunan yang berskala nasional serta nasional serta mempertipakan konsekuensi dan kornitmen bersama masyarakat Indonesia mengenai pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan demikian, fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan.

Pembangunan Ekonomi adalah merupakan salah satu upaya dalam rangka mendukung pelaksanaan salah satu prioritas yang tercantum dalam Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem kerakyatan. Penetapan prioritas tersebut mendasarkan pada masalah dan tantangan yang dihadapi serta arah kebijakan dalam pembangunan ekonomi, baik pembangunan jangka pendek maupun jangka menengah.

Sejak timbulnya krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis moneter pertengahan 1997, pembangunan di Indonesia terhenti karena ketidakmampuan pemerintah dalam membiayai proyek-proyek pembangunan yang disebabkan pendapatan pemerintah berkurang, khususnya dari sektor pajak dan retribusi. Krisis ekonomi telah berhasil

memunculkan kepermukaan beberapa kelemahan perekonomian nasional. Berbagai distorsi yang terjadi pada masa lalu telah melemahkan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi krisis, menimbulkan berbagai bentuk kesenjangan sosial dan menghambat kemampuan untuk mengatasi krisis dengan cepat. Kurang meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan membuat kesenjangan pertumbuhan antar daerah, antara perkotaan dan pedesaan, antar kawasan seperti kawasan barat dan kawasan timur Indonesia, maupun antar golongan masyarakat sehingga gejolak sosial menjadi sangat mudah terjadi.

Salah satu alasan penyelenggaraan otonomi daerah adalah agar pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan pusat. Ini merupakan bentuk koreksi atas pelaksanaan pembangunan ekonomi yang selama ini menitik beratkan pembangunan di pusat dan kurang memperhatikan perkembangan pembangunan daerah. Dengan kebijakan yang sentralistik ini menyebabkan terjadinya disparitas dan ketidakseimbangan pelaksanaan pembangunan di pusat dan daerah. Akibatnya hampir seluruh potensi ekonomi di daerah tersedot ke pusat sehingga daerah tidak mampu berkembang secara memadai. Jadi dengan otonomi daerah terkandung maksud untuk memperbaiki kekeliruan selama ini dengan cara memberikan peluang kepada daerah untuk mendapatkan dana lebih besar dan kebebasan untuk mengelolanya sendiri.

Dalam sistem otonomi bertingkat berdasarkan UU No. 5 tahun 1974, rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan atau realisasi APBD bukan merupakan masalah besar, karena pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk belanja pegawai, pengeluaran rutin dan pembangunan daerah. Istilah "bukan masalah besar" tersebut merujuk pada kenyataan bahwa otonomi yang dikembangkan, diimplementasikan dengan penyerahan urusan pusat pada daerah

Munculnya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan. Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, adalah jawaban atas permasalahan tersebut, Dengan demikian ideologi politik dan

struktur pemerintahan negara akan lebih bersifat desentralisasi dibanding dengan struktur pemerintahan sebelumnya yang bersifat sentralisasi. Maka sudah saatnya bagi pemerintah Indonesia untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang meletakkan peranan pemerintah daerah pada Posisi yang sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan warganya.

Pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang tersirat dalam perundangan tersebut, adalah pencerminan proses demokratisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dengan titik berat kepada pemerintah kabupaten/kota. Secara yuridis, pelaksanaan otonomi yang luas dan nyata tersebut bukan merupakan kelanjutan. Tetapi secara faktual empiris, merupakan kesinambungan dari pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU nomor 5 tahun 1974 dan bahkan peraturan sebelumnya. Jadi tujuan kebijakan desentralisasi adalah : mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah; peningkatan pendapatan asli daerah dan pengurangan subsidi dari pusat; mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah.

Menghadapi implementasi undang-undang tersebut, salah satu hal yang perlu dipersiapkan adalah penentuan kekhasan daerah yang merupakan unggulan dengan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik lokal sebagai modal untuk peningkatan kegiatan ekonomi. Pemerintah daerah dituntut untuk siap menerima beban dan tanggungjawab yang berkaitan dengan potensi yang dimilikinya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Artinya bahwa daerah provinsi perlu didorong dan harus mampu meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan peluang yang ada, serta menggali sumber-sumber baru yang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Sebaliknya dengan sistem otonomi baru yang nyata dan luas (UU Nomor 22 tahun 1999), dengan rendahnya PAD maka daerah dihadapkan pada permasalahan yang rumit. Disamping harus meningkatkan penerimaan, daerah juga harus memacu produktivitas pemerintah daerah dengan membangun sarana dan prasarana penunjang bagi tumbuh dan

berkembangnya investasi yang merupakan penggerak dalam proses pembangunan ekonomi di suatu daerah.

Otonomi fiskal daerah merupakan salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan, karena pengertian otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak, retribusi dan lain-lain. Namun harus diakui bahwa derajat otonomi fiskal daerah di Indonesia masih rendah, artinya daerah belum mampu membiayai pengeluaran rutinnya. Karena itu otonomi daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai keuangan yang efektif. Pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD (Radianto, 1997,42 ; A Halim , 2001,348). Realitas hubungan fiskal antara daerah dan pusat, ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Ini terlihat jelas dari rendahnya PAD terhadap total pendapatan dibandingkan dengan total subsidi yang didrop dari pusat.

Selama ini sumber dana PAD di empat provinsi di Pulau Jawa mencerminkan ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat masih sangat dominan.

Keleluasaan dalam usaha menggali sumber-sumber penerimaan tersebut, banyak daerah yang memikirkan bagaimana meningkatkan tarif pajak dan retribusi daerah serta obyek-obyek pajak dan retribusi yang baru. Hal ini menimbulkan keresahan di daerah, karena rakyat khawatir akan membayar pajak lebih banyak dibanding sebelum adanya otonomi daerah.

Dalam UU No. 34 tahun 2000 pasal 2 ayat (4) disebutkan bahwa dengan Peraturan daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten/kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2). Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan jenis-jenis pajak yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Kenyataan ini berpotensi untuk mendorong pemerintah daerah saling berlomba dalam menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) dengan mengesampingkan kriteria maupun prinsip perpajakan. Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 dan

Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 yang sebenarnya dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, justru berimplikasi menciptakan *horizontal imbalance*, disamping mengurangi *vertical imbalance* (FX. Sugiyanto, 2000: 4).

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas dan melihat pentingnya kemandirian Pendapatan Asli Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ”**.

1.2. Perumusan masalah

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi terletak pada kesiapan dan kemampuan daerah untuk menerima beban dan tanggungjawab yang dimilikinya dalam mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Artinya, pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah harus mampu meningkatkan PADnya melalui berbagai potensi yang dimiliki. Penerimaan yang berasal dari PAD provinsi Jawa Tengah jumlahnya masih lebih rendah dibandingkan dengan provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur, sehingga untuk membiayai kebutuhan daerahnya , Provinsi Jawa Tengah masih sangat tergantung pada penerimaan dari pemerintah pusat. Dengan kata lain, PAD Provinsi Jawa Tengah masih rendah dan selama daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pusat, maka selain akan meningkatkan beban anggaran pemerintah pusat, otonomi yang diharapkan dapat menciptakan kemandirian tersebut akan sulit untuk dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :

- a. Sejauhmana kemampuan fiskal daerah dalam mendukung kemandirian ekonomi Provinsi Jawa Tengah.
- b. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam penerimaan PAD Provinsi Jawa Tengah.

1.3. Tujuan dan manfaat penelitian.

1.3.1. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1.3.2. Manfaat Penelitian.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang memerlukan, terutama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pemanfaatan dan peningkatan potensi penerimaan PAD.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan guna peningkatan PAD.
- c. Sebagai bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut.

Nama : Erwin

NIM : 182510088

Prodi : Magister Manajemen

Mata Kuliah : Metodologi Riset Keuangan

Tugas 3

Silahkan buat Bab 1 PENDAHULUAN dengan menampilkan fenomena dan research gap

Jawaban :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat sangat diperlukan karena menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2016) bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia yang *Well literate* masih kecil, yakni 29,66 %. Sementara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2016) menilai tingkat literasi keuangan masyarakat di Sumatera Selatan (Sumsel) masih kecil. Hanya mencapai 23,25 persen dengan literasi tertinggi pada sektor perbankan. Angka tersebut masih dirasa kecil meskipun sudah banyak masyarakat yang telah menggunakan produk atau layanan jasa keuangan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2016) tingkat literasi keuangan dapat dipertimbangkan dari profil responden berdasarkan kesesuaian aspek *gender*, strata wilayah, usia, pengeluaran, pekerjaan, dan tingkat pendidikan.

Berdasarkan wawancara peneliti pada calon responden mengenai literasi keuangan, semua responden menjawab tidak mengetahui mengenai literasi keuangan. Sementara, banyak responden mengetahui tentang produk-produk keuangan seperti simpanan dan pinjaman. Beberapa responden juga menggunakan produk keuangan seperti menabung. Beberapa responden juga menggunakan emas sebagai investasi. Beberapa responden juga menggunakan surat berharga (saham dan obligasi) sebagai investasi.

Nidar dan Bestari (2012) menyatakan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi literasi keuangan. Pengelompokan faktor-faktor tersebut menjadi beberapa kategori yaitu berdasarkan demografi, karakteristik sosial dan ekonomi, pengalaman keuangan, pendidikan keuangan, kondisi ekonomi, karakteristik keluarga, aspirasi, dan lokasi geografis.

Literasi keuangan merupakan rangkaian proses dan aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan konsumen dan masyarakat luas sehingga mampu mengelola keuangan pribadi dengan baik (OJK, 2016). Pentingnya literasi keuangan dalam mengelola aset keuangan, membuat penulis ingin mengetahui bagaimana tingkat literasi keuangan pada karyawan swasta pada Sudirman Office Tower yang dipengaruhi oleh faktor usia, jenis kelamin, pendidikan dan pendapatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) usia adalah lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan). Chen and Volpe (1998) menemukan tingkat literasi keuangan yang rendah pada peserta yang berusia 18–22 tahun. Alasan untuk rendahnya tingkat pengetahuan dapat dikaitkan

dengan usia muda 18 sampai 22 tahun dari peserta atau di bawah 30 tahun sebagai mayoritas dari mereka berada dalam tahap yang sangat awal siklus dari hidup finansial mereka. Saat tahap siklus ini, mereka memiliki sejumlah masalah keuangan yang berkaitan dengan pengetahuan umum tentang keuangan, tabungan dan pinjaman, dan asuransi. Saat periode ini, sebagian besar pendapatan mereka dibelanjakan konsumsi daripada investasi.

Menurut Notoatmodjo (2007) Usia berpengaruh terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. Semakin bertambah usia semakin bijaksana, semakin banyak informasi yang dijumpai dan semakin banyak hal yang dikerjakan sehingga menambah pengetahuannya.

Menurut Iawan (2016) usia tidak mempengaruhi tingkat literasi keuangan. Menurut Nunoo dan Andoh (2012) usia tidak signifikan dalam menjelaskan literasi keuangan. Menurut Taft, Hosein, dan Mehrizi dan Roshan (2013) menemukan terdapat hubungan positif antara usia dengan literasi keuangan dan *financial wellbeing*. Faktor usia sangat berperan penting untuk mengetahui seberapa besar tingkat literasi keuangan konsumen. Sebab semakin bertambahnya usia seseorang, seharusnya ia akan semakin bijaksana, semakin banyak informasi yang dijumpai dan semakin banyak hal yang dikerjakan sehingga menambah pengetahuannya dan akan lebih cenderung memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jenis kelamin merupakan

sifat (keadaan) jantan atau betina (laki-laki atau perempuan).

Menurut Lynn dan Irwing (2002) mengatakan laki-laki lebih cerdas dari perempuan, ini dilihat dari IQ laki-laki rata-rata lima poin lebih tinggi dibanding perempuan. Menurut Nababan dan Sadalia (2012) memaparkan bahwa salah satu karakteristik respondennya yaitu laki-laki menunjukkan bahwa pengetahuan tentang keuangan relatif tinggi dari pada perempuan.

Menurut Andrew dan Linawati (2014) jenis kelamin memiliki hubungan yang signifikan terhadap perilaku keuangan para karyawan swasta di Surabaya. Menurut Agusta (2016) *gender* menunjukkan adanya pengaruh dalam meningkatkan literasi keuangan. Menurut Nunoo dan Andoh (2012) jenis kelamin signifikan dalam menjelaskan literasi keuangan. Menurut Iewan (2016) jenis kelamin tidak mempengaruhi tingkat literasi keuangan. Karena pria maupun perempuan memiliki tingkat pengetahuan keuangan yang sama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku individu atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui cara pengajaran dan pelatihan.

Menurut Suhardi (2007) Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang salah satunya adalah pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka makin mudah orang tersebut menerima informasi sehingga semakin banyak pula pengetahuan yang didapatkannya.

Menurut Iewan (2016) pendidikan mempengaruhi tingkat literasi keuangan. Menurut Wiharno (2016) tingkat pendidikan merupakan variabel yang sangat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pengetahuan keuangan,

tinggi rendahnya perilaku keuangan dan tinggi rendahnya tingkat sikap keuangan. Menurut Agusta (2016) tingkat pendidikan menunjukkan adanya pengaruh dalam meningkatkan literasi keuangan. Menurut Nunoo dan Andoh (2012) pendidikan signifikan dalam menjelaskan literasi keuangan. Karena pendidikan membantu seseorang untuk mengambil keputusan keuangan dengan baik. Menurut Andrew dan Linawati (2014) tingkat pendidikan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap perilaku keuangan karyawan swasta di Surabaya. Menurut Bachrudin (2016) tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perencanaan keuangan keluarga. Karena responden yang memiliki pendidikan yang tinggi, menganggap dirinya mampu untuk mengatur keuangannya dengan baik dalam pengalokasian maupun dalam pengambilan keputusan keuangan tanpa perlu membuat perencanaan keuangan terlebih dahulu. Sebaliknya, responden yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, justru merasa perlu untuk mengatur keuangannya dan akan merencanakan keuangannya sejak dini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendapatan seseorang merupakan sesuatu yang diadakan, dibuat dan dijadikan oleh usaha yang dijalani oleh seseorang.

Menurut Chen dan Volpe (2002) tingkat pemahaman terhadap masalah keuangan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Menurut Keynes (2009) Apabila pendapatan meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat. Hanya saja peningkatan konsumsi tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK,

2016) pendapatan penduduk meningkat tapi pengetahuan mereka akan keuangan atau jasa keuangan masih minim. Menurut Bachrudin (2016) tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap perencanaan keuangan keluarga. Menurut Andrew dan Linawati (2014) tingkat pendapatan memiliki hubungan yang signifikan terhadap perilaku keuangan karyawan swasta di Surabaya. Karena semakin tinggi pendapatan seseorang akan semakin banyak seseorang itu mengalokasikan dana untuk meningkatkan pengetahuan keuangan.

Manfaat praktis apabila masalah ini diselesaikan adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi karyawan swasta pada Sudirman Office Tower guna meningkatkan tingkat literasi keuangan dalam mengelola aset keuangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk membahas seberapa besar tingkat literasi keuangan pada karyawan swasta pada Sudirman Office Tower

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti

1. Apakah usia, jenis kelamin, pendidikan dan pendapatan berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan karyawan swasta pada Sudirman Office Tower secara parsial ?
2. Apakah usia, jenis kelamin, pendidikan dan pendapatan berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan karyawan swasta pada Sudirman Office Tower secara simultan ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas maka penelitian ini dibatasi pada pembahasan analisis pengaruh usia, jenis kelamin, pendidikan dan pendapatan terhadap tingkat literasi keuangan (studi kasus karyawan swasta pada Sudirman Office Tower).

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh usia, jenis kelamin, pendidikan dan pendapatan secara parsial terhadap tingkat literasi keuangan karyawan swasta pada Sudirman Office Tower.
2. Untuk mengetahui pengaruh usia, jenis kelamin, pendidikan dan pendapatan secara simultan terhadap tingkat literasi keuangan karyawan swasta pada Sudirman Office Tower.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penambahan wawasan baru bagi dunia manajemen, serta memperkaya hasil penelitian tentang pengaruh usia, jenis kelamin, dan pendapatan terhadap tingkat literasi keuangan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi semua individu guna meningkatkan literasi keuangan dalam mengelola aset keuangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari beberapa bab meliputi

BAB I PENDAHULUAN

Penulis akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penulis akan membahas mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori yang berisikan pengertian usia, pengertian jenis kelamin, pengertian pendidikan, pengertian pendapatan dan pengertian literasi keuangan, penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Penulis akan membahas metode penelitian yang terdiri dari populasi, sampel, jenis data, sumber data, definisi operasional dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis akan membahas mengenai pengolahan terhadap data yang telah diperoleh yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang sedang diteliti penulis. Di dalam bab ini terdapat gambaran umum mengenai objek penelitian, hasil penelitian serta pembahasan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh dan penulis akan memberikan saran bagi karyawan swasta pada Sudirman Office Tower.